

Dampak Destinasi Wisata Nglinggo Tritis Kab. Kulon Progo terhadap Transformasi Perdesaan

Indra Cahya Nugraha¹, Bangga Prameswara², Frisda Sfarliana²

Affiliation

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.

²Magister Perencanaan Kepariwisata, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.

Correspondence

Indra Cahya Nugraha. Master of Urban and Regional Planning, School of Architecture, Planning and Policy Development, Bandung Institute of Technology, Ganesha Street No.10, Bandung 40132, Indonesia. Email: indra.cahyanugraha@gmail.com.

Abstract

Deagrarianization in Indonesia has been happening since the 1970's where the proportion of gross domestic product in agriculture has been surpassed by industry. Tourism is one of the nonagricultural sectors that can help rural communities who live around tourist destinations to diversify their occupation and improve their welfare. This case study was conducted in Nglinggo Tritis, Kulon Progo Regency, Yogyakarta Special Region by collecting primary data by interviewing tourist destination workers and secondary data in the form of statistics and information from online news which is described with qualitative approach. Results showed that the tourist destination impacts the economy of rural communities around the tourist destination by giving them a chance to work outside the agricultural sector.

Keywords: *deagrarianization; rural transformation; tourism impact*

Article Information: Submitted: 23-5-2022 | Revised: 29-1-2024 | Accepted: 5-2-2024



Copyright © 2021 by the author(s). This article is published by Universitas Gadjah Mada, Indonesia under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. Anyone may reproduce, distribute, translate, and create derivative works of this article (for both commercial and noncommercial purposes), subject to full attribution to the original publication and author(s). The full terms of this license may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcod>

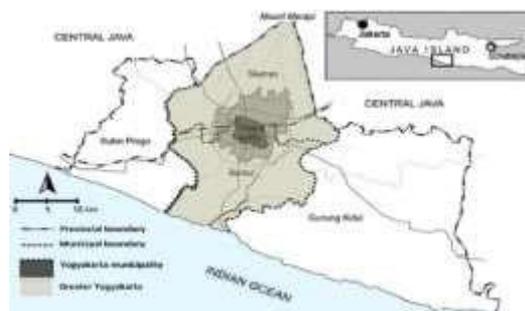
Pendahuluan

Penelitian dari McCulloch, Weisbrod dan Timmer (2007) menunjukkan bahwa sebagian besar warga miskin dunia masih bergantung pada pertanian dengan produktivitas rendah untuk bertahan hidup, atau biasa disebut pertanian subsisten. Transformasi struktural secara sederhana dapat menurunkan kemiskinan. Berdasarkan data Indonesia Family Life Survey, penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan dan bekerja di luar sektor pertanian memiliki peluang untuk keluar dari garis kemiskinan. (McCulloch, Weisbrod dan Timmer, 2007).

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan data dari World Bank Development Indicators tahun 2017, nilai tambah sektor pertanian di Indonesia sudah dilampaui oleh sektor industri dan jasa semenjak tahun 1974. Hal ini berakibat wilayah-wilayah di Indonesia yang masih mengandalkan sektor pertanian menjadi tertinggal jika dilihat secara relatif dengan indikator nilai tambah terhadap GDP. Pekerjaan di sektor pertanian yang umumnya adalah pekerjaan yang bersifat musiman menjadikan para pelakunya sangat mungkin untuk melakukan diversifikasi pendapatan. Ellis dalam Rigg (2019) menyatakan bahwa di negara-negara Asia Tenggara sangat umum terjadi diversifikasi pekerjaan dari sektor pertanian dan non pertanian. Secara rata-rata, ekonomi perdesaan non pertanian menyerap 30% tenaga kerja dan mencakup 50% dari seluruh pendapatan pekerja perdesaan (Ellis dalam Rigg, 2019).

Hal-hal tersebut terjadi akibat dorongan-dorongan seperti pendapatan sektor non pertanian yang lebih tinggi, terbukanya akses dari perdesaan ke perkotaan, dan kebijakan-kebijakan pengembangan wilayah oleh pemerintah yang cenderung mendukung sektor industri dan jasa karena memberikan nilai tambah yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kebijakan pengembangan wilayah oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan mengembangkan potensi pariwisata. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan 5 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang. Dari 5 KSPN tersebut, hanya ada 1 yang berada di Pulau Jawa. Dalam konteks spasial, Pulau Jawa adalah yang paling banyak menerima wisatawan sebagai destinasi wisata, selain itu penduduk Pulau Jawa juga yang paling banyak melakukan aktivitas pariwisata. Jumlah total kunjungan wisatawan ke Pulau Jawa pada tahun 2020 yang sebanyak 34.775.759 kunjungan merupakan potensi yang sangat baik jika dapat dimanfaatkan. Masing-masing daerah mencoba memaksimalkan potensi wisata dengan maksud menarik wisatawan sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak wisatawan yang datang maka potensi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga akan semakin besar.



Gambar 1. Peta Pertumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Diwangkari, 2014

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah wilayah administratif setingkat provinsi yang berlokasi di Pulau Jawa. Seperti halnya negara Indonesia yang memiliki kutub pertumbuhan di Pulau Jawa, DIY juga memiliki kutub pertumbuhan yaitu Kota Yogyakarta dan sebagian kecil Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang sudah mengalami efek mengkota (urbanisasi) karena secara geografis berbatasan langsung. Penurunan kontribusi pertanian terhadap PDRB juga terjadi di DIY, dengan kontribusi pertanian terhadap PDRB mencapai 11,21% di tahun 2010 dan mengalami fluktuasi hingga menurun menjadi 9,72% di tahun 2021.

Transformasi ekonomi di wilayah perdesaan dari pertanian ke non pertanian dapat menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warga desa yang bertempat tinggal di sekitar destinasi wisata memiliki pilihan untuk bekerja pada sektor pariwisata baik secara paruh waktu maupun secara penuh. Bekerja pada sektor non pertanian di wilayah perdesaan mampu secara signifikan meningkatkan peluang untuk keluar dari garis kemiskinan (McCulloch, Weisbrod dan Timmer, 2007).

Di wilayah DIY, Kabupaten Kulon Progo yang secara administratif memiliki wilayah Borobudur Highland dan jalur bedah Menoreh mengembangkan destinasi wisata perkebunan teh di Pedukuhan (dusun) Nglingsgo Barat dan Pedukuhan Tritis, Kalurahan (sebutan untuk wilayah administratif setingkat desa di DIY) Pagerharjo, Kapanewon (sebutan untuk wilayah administratif setingkat kecamatan di DIY) Samigaluh. Daerah wisata perkebunan teh tersebut berada di Kapanewon Samigaluh yang merupakan kapanewon dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi di Kabupaten Kulon Progo. Kapanewon Samigaluh yang berada pada jarak sekitar 30 km dari pusat Kota Wates sebagai ibukota kabupaten dan 39 km dari Kota Yogyakarta sebagai ibukota DIY tidak dapat mengandalkan model pertumbuhan *trickling down effect* dari pusat pertumbuhan. Ketinggian daratan yang berada pada kisaran 500-1.000 meter dari permukaan laut menjadikan wilayah Kapanewon Samigaluh ideal untuk kegiatan perkebunan teh. Meningkatnya destinasi wisata alam yang sebelumnya sudah terjadi di Kabupaten Kulon Progo menjadikan pengelola kebun teh terdorong untuk mengembangkan destinasi wisata alam kebun teh yang sebelumnya belum pernah ada di wilayah kabupaten.

Pariwisata dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain meningkatkan pendapatan pelaku usaha pariwisata dan pemerintah, membuka lapangan kerja, dan memberikan kontribusi pada pengembangan wilayah (Lickorish, 1994 dalam Mason, 2003). Pariwisata juga dapat memberikan dampak negatif seperti inflasi, biaya peluang (opportunity cost), dan ketergantungan yang berlebihan pada sektor pariwisata (Mason, 2003). Pariwisata memberikan peluang redistribusi pendapatan dan kesempatan kerja pada

daerah pinggiran karena banyak aset pariwisata (seperti warisan budaya dan pemandangan alam) yang terdapat di sana (Ryan, 2003).

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Deagrarianisasi dan Dislokasi Nafkah Komunitas Petani di Pedesaan Jawa (Pujiriyani dkk., 2018), dan Evaluasi Dampak Pariwisata terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal (Hamzah dkk., 2018) belum ada yang secara langsung mengaitkan antara dampak pariwisata dengan transformasi pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap transformasi ekonomi wilayah pedesaan yaitu perubahan struktur ekonomi daerah, luas lahan pertanian, perubahan penghidupan masyarakat, dan tingkat kesejahteraan warga di wilayah sekitar destinasi wisata Nglinggo Tritis.

Tinjauan Pustaka

Definisi Pariwisata

Definisi dari pariwisata terus berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan Mason (2003), beberapa definisi yang sering dirujuk oleh peneliti yaitu:

1. Matthieson dan Wall mendefinisikan pariwisata adalah pergerakan sementara orang-orang menuju ke wilayah di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya untuk melakukan aktivitas di tempat tujuan tersebut, dan menggunakan fasilitas yang dibangun untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Jafari sudah menyinggung mengenai dampak dari pariwisata dalam definisinya, yaitu studi tentang manusia yang melakukan aktivitas di luar tempat tinggal biasanya, termasuk industri yang mengakomodir kebutuhan aktivitas tersebut, dan dampaknya terhadap sosio-kultural, ekonomi, dan lingkungan.
3. Chadwick menyederhanakan definisi pariwisata sebagai perjalanan ke luar dari wilayah tempat tinggalnya dengan tujuan:
 - a. Mencari kesenangan, seperti bersantai, menyaksikan budaya, mengunjungi teman dan saudara
 - b. Urusan pekerjaan, seperti pertemuan bisnis, konferensi, dan sebagainya. Tujuan lain, seperti berobat, belajar, dan transit (Matthieson dan Wall; Jafari; dan Chadwick, dalam Mason, 2003).

Daya Tarik Wisata

Berbicara mengenai pariwisata, salah satu faktor yang sangat penting dan sangat menentukan adalah adanya daya tarik wisata. pengertian daya tarik wisata menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab I, pasal 15, menyebutkan sebagai berikut “daya tarik wisata” adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut Yoeti (1986), terdapat beberapa hal yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu tempat daerah tujuan wisata. Hal tersebut dapat dibagi tiga yakni: (1) benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang dalam istilah pariwisata disebut dengan istilah *natural amenities*. Hal-hal yang termasuk kelompok ini adalah: iklim, bentuk tanah dan pemandangan, hutan belukar, fauna dan flora serta pusat-pusat kesehatan

seperti sumber air mineral, mandi lumpur, serta sumber air panas; (2) hasil ciptaan manusia (*man made supply*); hasil ciptaan manusia yang termasuk didalamnya adalah: benda-benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan (*historical, cultural, and religion*) dan (3) tata cara hidup masyarakat (*the way of life*) merupakan potensi yang dapat ditawarkan kepada wisatawan seperti kebiasaan hidup suatu masyarakat dan adat istiadatnya (Yoeti, 1986). Dalam konteks spasial, Ryan (2003) menyatakan bahwa daya tarik wisata atau aset pariwisata (seperti pemandangan alam dan warisan budaya atau sejarah) banyak ditemukan di wilayah pinggiran yang jauh dari perkotaan (Ryan, 2003)

Dampak Pariwisata

Beberapa dampak positif dari pariwisata menurut Lickorish dalam Mason (2003):

1. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha pariwisata dan pemerintah
2. Membuka lapangan pekerjaan
3. Memberikan kontribusi pada pengembangan wilayah

Sedangkan dampak negatifnya menurut Mason (2003) adalah:

1. Inflasi
2. Biaya peluang (*opportunity cost*)
3. Ketergantungan berlebihan pada pariwisata

Chris Ryan (2003) menjelaskan secara lebih terperinci bahwa dampak ekonomi dari pariwisata dapat diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan negara dari wisatawan mancanegara yang dihitung sebagai pendapatan ekspor.
2. Pengeluaran wisatawan akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung pada retribusi dan pajak pemerintah.
3. Pengeluaran wisatawan memberikan keuntungan pada bisnis pariwisata dan memperkuat modal pada industri pariwisata.
4. Membuka lapangan pekerjaan.
5. Menimbulkan eksternalitas.
6. Peningkatan perputaran mata uang.
7. Terutama pada ekonomi skala kecil (misalnya di negara kecil atau wilayah kecil), dampak ekonomi akan terasa lebih besar.
8. Berpeluang redistribusi pendapatan dan pekerjaan ke wilayah pinggiran yang bukan merupakan subjek arus utama ekonomi. Hal ini karena aset pariwisata (seperti pemandangan alam dan warisan budaya atau sejarah) banyak ditemukan di wilayah pinggiran yang jauh dari perkotaan.

Harus menjadi catatan bahwa kategori di atas dapat juga menyebabkan kerugian jika tidak dikelola dengan baik (Ryan, 2003). Hasil penelitian Hamzah, Hermawan dan Wigati (2018), menjelaskan bahwa dampak pariwisata terhadap aspek ekonomi masyarakat lokal sering ditemukan sebagai berikut (Hamzah, Hermawan, dan Wigati, 2018):

1. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
2. Dampak terhadap kesempatan kerja
3. Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan
4. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol (ekonomi) masyarakat
5. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya

Dalam beberapa penelitian, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor usaha non pertanian yang “ramah desa”. Pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat desa merupakan alternatif yang lebih baik untuk keberlanjutan wilayah perdesaan. Hamzah, Hermawan, dan Wigati (2018) berargumen bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam sektor jasa dan perdagangan pariwisata di desa sekitar candi Borobudur meningkat walaupun tidak setinggi jika bekerja sebagai buruh di sebuah industri besar. Peluang usaha pariwisata di sekitar Candi Borobudur banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat desa di sekitarnya seperti kemampuan berbahasa Inggris dan kemampuan berwirausaha.

Kasus lain seperti di desa wisata Dusun Nglepen, Kabupaten Sleman yang mengembangkan destinasi wisata rumah *dome teletubbies* (Nugroho, 2018) dan Desa Pampang, Kabupaten Gunungkidul yang mengembangkan desa ekowisata (Rohani dan Purwoko, 2020) menunjukkan bahwa destinasi wisata yang dikembangkan berbasis masyarakat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa memberikan dampak negatif yang berlebihan. Kedua destinasi wisata tersebut mampu membuka kesempatan kerja di sektor non pertanian dengan tetap mempertahankan sektor pertanian sebagai sektor basis dari perekonomian di wilayah desanya. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam destinasi wisata *community-based tourism*, maka dampaknya juga akan semakin besar. Faktor perasaan memiliki dari masyarakat setempat merupakan hal penting yang mampu mendorong semakin berkembangnya destinasi wisata *community-based tourism*.

Transformasi Ekonomi Perdesaan

Transformasi perdesaan adalah sebuah proses perubahan komprehensif dimana masyarakat perdesaan memperluas kehidupannya dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertanian; menjadi bergantung kepada wilayah luar untuk bertukar barang dan jasa serta pemikiran. Transformasi perdesaan merupakan hasil dari efek globalisasi yang mendorong ekonomi keluar dari sektor pertanian, sistem pertanian pangan dunia, dan urbanisasi wilayah perdesaan. Walaupun faktor global memiliki pengaruh besar, akan tetapi struktur sosial, kerangka institusional, dan peran masyarakat lokal menjadi faktor penyangga yang berakibat transformasi perdesaan memiliki hasil yang berbeda untuk masing-masing wilayah dan negara. Transformasi perdesaan cenderung mereorganisasi masyarakat di suatu wilayah tanpa memindahkan keluar aktivitas ekonomi dan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Hal ini akan berdampak pada menurunnya struktur ekonomi sektor pertanian secara relatif dibandingkan dengan struktur industri dan jasa (Berdegue, Rosada dan Bebbington, 2014).

Transformasi perdesaan seringkali dikaitkan dengan istilah deagrarianisasi (*deagrarianization*) dan transisi agraria yang terlihat dengan menurunnya pekerja di sektor pertanian, peningkatan diversifikasi kehidupan, struktur ekonomi yang bergeser dari pertanian ke non pertanian, keberagaman jenis pekerjaan, mobilitas penduduk yang meningkat, dan peningkatan interaksi timbal balik perdesaan ke perkotaan. Transformasi perdesaan berhubungan dengan perubahan pola hidup karena meningkatnya populasi serta perubahan teknologi dalam kehidupan. Perubahan ini tidak dapat dipisahkan dari perubahan

ekonomi pada skala nasional dan global yang menstimulasi modernisasi pada ekonomi dan teknologi di pedesaan (Rigg dalam Fahmi dan Sari, 2021).

Dalam kasus negara-negara belahan dunia selatan (*global south*) terutama di wilayah Asia Tenggara, sudah terlihat adanya elemen deagrarianisasi yaitu reorientasi pendapatan, perubahan pekerjaan dan relokasi spasial. Perubahan identifikasi sosial pedesaan terlihat dari adanya kecenderungan masyarakat terutama generasi muda yang berupaya untuk menghindari pekerjaan di sektor pertanian. Hal ini banyak dipengaruhi oleh terbukanya wilayah pedesaan karena pembangunan infrastruktur. Terbukanya peluang untuk memiliki penghasilan di luar sektor pertanian menjadikan banyaknya petani yang awalnya hanya melaksanakan pertanian subsisten menjadi berpenghasilan ganda di luar pertanian. Terdapat banyak istilah untuk ini mulai dari "*occupational diversity*" oleh Martin, Lorensen dan Bunnefeld, "*multiplicity*" oleh Rigg, "*pluriactivity*" oleh Andriesse dan Phommalath, "*diverse and multisited livelihood*" oleh Preston dan Ngah, "*livelihood bricolage*" oleh Dressler dkk, dan "*diversification for survival*" oleh Rigg, Salamanca, dan Parnwell (Martin, Lorensen dan Bunnefeld; Rigg; Andriesse dan Phommalath; Preston dan Ngah; Dressler dkk; dan Rigg, Salamanca, dan Parnwell, dalam Rigg, 2019).

Transformasi pertanian hanyalah separuh dari perubahan ekonomi pedesaan yang terjadi pada satu abad terakhir. Aktivitas ekonomi pedesaan "tradisional" lainnya seperti kehutanan, perikanan, dan pertambangan telah mengalami evolusi serupa pada jumlah pekerja di sektor tersebut. Pada saat yang sama, jumlah pekerja pedesaan di sektor manufaktur, pariwisata, dan jasa mengalami peningkatan (Woods, 2005). Penelitian sebelumnya seperti Deagrarianisasi dan Dislokasi Nafkah Komunitas Petani di Pedesaan Jawa (Pujiriyani dkk., 2018), dan Evaluasi Dampak Pariwisata terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal (Hamzah dkk., 2018) belum ada yang secara langsung mengaitkan antara dampak pariwisata dengan transformasi pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap transformasi ekonomi wilayah pedesaan yaitu perubahan struktur ekonomi daerah, luas lahan pertanian, perubahan penghidupan masyarakat, dan tingkat kesejahteraan warga di wilayah sekitar destinasi wisata Nglinggo Tritis.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pariwisata berdampak pada transformasi pedesaan di wilayah sekitar destinasi wisata Nglinggo Tritis dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari observasi di wilayah destinasi wisata dan wawancara dengan ketua desa wisata Nglinggo dan desa wisata Tritis untuk menggali informasi mengenai perkembangan desa wisata dan dampaknya terhadap masyarakat di sekitarnya. Data sekunder didapatkan dari produk dokumen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Badan Pusat Statistik.

Alat analisis yang digunakan adalah menilai data-data yang diperoleh secara kualitatif berdasarkan acuan yang dipilih oleh penulis, diantaranya:

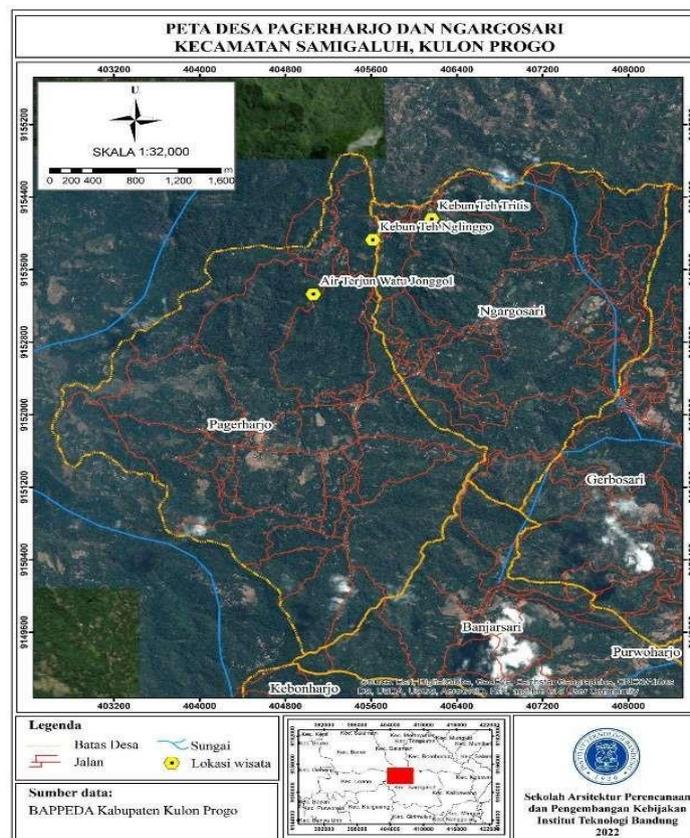
1. Perubahan struktur ekonomi daerah
2. Perubahan luas lahan pertanian dan pekerja di sektor pertanian

3. Peluang pekerjaan dari penyediaan fasilitas destinasi wisata
4. Pengentasan kemiskinan

Hasil dan Pembahasan

Destinasi Wisata Nglinggo Tritis

Daya tarik wisata yang dapat dikunjungi di kawasan Nglinggo Tritis cukup variatif. Daya tarik wisata yang ada di sini antara lain: air terjun Watu Jonggol, kebun teh Nglinggo, kebun teh Tritis, bukit Ngisis, *homestay*, kuliner khas, wisata sadap aren, dan wisata edukasi kehidupan masyarakat yang diminati oleh wisatawan lokal maupun internasional. Selain wisatawan domestik, destinasi ini juga sudah cukup banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Nglinggo dibentuk sejak tahun 2012, awal pengembangan wisata perkebunan teh. Pokdarwis ini diarahkan untuk pembentukan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) agar tidak hanya Pedukuhan Nglinggo Barat dan Timur saja yang menikmati hasilnya namun juga dusun lain di wilayah Kalurahan Pagerharjo yang tidak memiliki potensi wisata terjadi unsur pemerataan. Pada pengelolaannya, pokdarwis dan agen perjalanan telah bekerjasama yang kemudian dilanjutkan dengan membuat paket wisata. Daya tarik wisata yang ditawarkan yaitu pemandangan alam di Pedukuhan Nglinggo barat, Pedukuhan Tritis dan sekitarnya yaitu kebun teh Nglinggo, kebun teh Tritis, bukit Ngisis, kebun teh Tritis, puncak Widosari, dan air terjun atau grojogan Watu Jonggol. Bagi pengunjung yang akan menginap disediakan fasilitas berupa *homestay* dengan harga murah. Peta lokasi destinasi wisata Nglinggo Tritis terhadap Kapanewon Samigaluh dapat dilihat pada gambar di bawah.

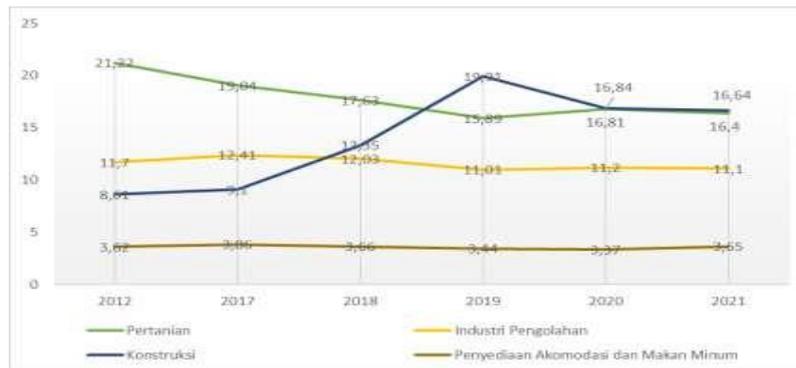


Gambar 2. Peta Kalurahan Pagerharjo dan Ngargosari

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2022

Perubahan Struktur Ekonomi Daerah

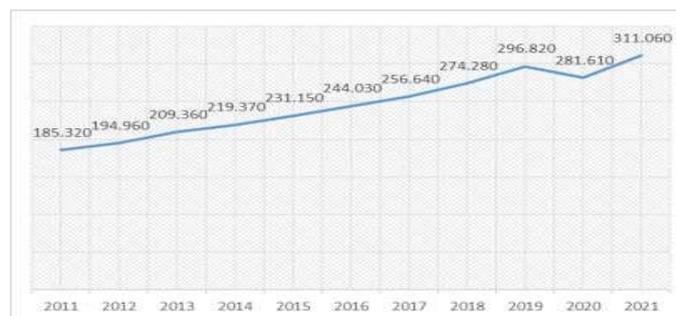
Melihat data distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, Kabupaten Kulon Progo sudah mengalami deagrarianisasi sejak tahun 2012 di mana distribusi persentase PDRB pada sektor pertanian yang mencapai 21,22% terus mengalami penurunan, di lain pihak sektor konstruksi mengalami kenaikan yang stabil hingga mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2018 dan 2019 dikarenakan adanya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Sektor pariwisata yang termasuk dalam kriteria lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di dalam struktur PDRB mengalami fluktuasi namun cenderung stabil pada kisaran 3,6%. Secara lebih lengkap dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 3 Distribusi PDRB ADHB 2012-2021 Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka, 2022 (diolah)

Berdasarkan data BPS, dari tahun 2011 hingga tahun 2021, terdapat kenaikan besaran PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Di tahun 2011, besarnya baru sebesar 185,3 miliar rupiah dan dalam jangka waktu 10 tahun di tahun 2021 sudah mencapai angka 311,1 miliar rupiah. Dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Gambar 4. Besaran PDRB ADHK 2011-2021 Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Kulon Progo (Juta Rupiah)

Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka, 2022 (diolah)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa aktivitas ekonomi di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Kulon Progo meningkat cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2020, dampak pandemi covid-19 cukup memberikan penurunan nilai, akan tetapi pada tahun 2021 sudah membaik dan kembali meningkat melebihi capaian pada tahun 2019. Berdasarkan keterangan dari ketua desa wisata, destinasi wisata Nglinggo Tritis sendiri merupakan destinasi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat yang terbentuk dalam desa wisata Nglinggo dan desa wisata Tritis. Walaupun demikian, pihak pemerintah

kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 30 tahun 2019 tetap memungut retribusi untuk wisatawan yang mengunjungi destinasi ini. Jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata Nglingsgo Tritis cukup stabil pada 63.107 di tahun 2017 hingga mencapai 67.060 di tahun 2019 dan mengalami penurunan karena pandemi covid-19 di tahun 2020 dengan 34.958 pengunjung. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan dan Jumlah Pendapatan Retribusi 2017-2020 Destinasi Wisata Nglingsgo Tritis

	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan	63.107	63.312	67.060	34.958
Jumlah Pendapatan (Rp 000)	128.664	133.758	197.509	111.828

Sumber: Database Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2021 (diolah)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan di Nglingsgo Tritis cukup stabil peningkatannya, akan tetapi terdampak pandemi covid-19 di tahun 2020 dan menurun cukup signifikan. Seiring dengan jumlah kunjungan, jumlah pendapatan juga meningkat dengan stabil. Data jumlah pendapatan tersebut baru terbatas pada pendapatan tiket masuk dan belum termasuk pendapatan dari pengeluaran wisatawan untuk biaya penginapan, biaya masuk ke spot foto, jasa *guide*, paket wisata *jeep*, paket wisata *outbound*, pendapatan pedagang dari warung di sekitar destinasi, dan biaya parkir kendaraan. Berdasarkan keterangan dari ketua desa wisata, sebagian kecil dari pendapatan tersebut dikumpulkan ke dalam kas desa wisata dan dikelola untuk pengembangan destinasi wisata ke depan serta sisanya digunakan untuk operasional dan kesejahteraan seluruh pengelola destinasi. Selama ini, kelompok pengelola desa wisata selalu bisa menyelesaikan pembagian pendapatan dengan baik tanpa ada konflik yang berarti berkat musyawarah bersama oleh seluruh anggota kelompok desa wisata.

Luas Lahan Pertanian dan Pekerja di Sektor Pertanian

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kulon Progo, luasan lahan pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dari tahun 2012 seluas 45.326 Ha menjadi 47.864 Ha di tahun 2020 (BPS Kabupaten Kulon Progo, 2022). Untuk Kapanewon Samigaluh di mana berlokasinya Desa Wisata Nglingsgo Tritis, luasan lahan pertanian dari tahun 2012 hingga 2020 tetap pada 5.590 Ha. Jumlah petani di Kapanewon Samigaluh juga mengalami peningkatan yang stabil dari 13.474 di tahun 2006 menjadi 13.456 di tahun 2012 dan terakhir 13.923 di tahun 2020. Jika dilihat secara lebih detail untuk lokasi pedukuhan destinasi wisata Nglingsgo Tritis berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani/pekebun pada tahun 2017 dan 2021 mengalami penurunan. Lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 2. Jumlah Penduduk yang Bekerja sebagai Petani/ Pekebun 2017 dan 2021 di Pedukuhan Tritis dan Nglinggo Barat

	2017		2021	
	Petani/ Pekebun	Jumlah Penduduk	Petani/ Pekebun	Jumlah Penduduk
Tritis	200 (54,3%)	368	189 (53,5%)	353
Nglinggo Barat	187 (50,1%)	373	168 (44,8%)	375

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2022 (diolah)

Dapat dilihat bahwa jumlah dan persentase penduduk yang bekerja sebagai petani/ pekebun pada tingkat pedukuhan yang menjadi lokasi destinasi wisata tersebut yakni pedukuhan Tritis dan pedukuhan Nglinggo Barat, sektor pertanian sudah mulai terdiversifikasi dan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 di pedukuhan Tritis, jumlah petani/ pekebun adalah 200 atau 54,3% dari jumlah penduduk yaitu 368 jiwa, sedangkan di pedukuhan Nglinggo Barat, jumlah petani/ pekebun adalah 187 atau 50,1% dari jumlah penduduk yaitu 373 jiwa. Pada tahun 2021 mengalami penurunan di kedua pedukuhan dengan jumlah petani/ pekebun di pedukuhan Tritis menjadi 189 atau 53,5% dari jumlah penduduk 353 jiwa dan di pedukuhan Nglinggo Barat turun menjadi 168 atau hanya 44,8% dari jumlah penduduk 375 jiwa.

Berdasarkan data statistik tersebut, pertanian di Kapanewon Samigaluh belum mengalami deagrarianisasi karena luas lahan pertanian masih tetap dan jumlah petani mengalami peningkatan cukup stabil. Akan tetapi dalam skala yang lebih kecil yakni tingkat pedukuhan, penurunan pekerja petani/ pekebun di pedukuhan tersebut sudah terjadi. Jika melihat jumlah penduduk yang tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan, sangat dimungkinkan pergantian profesi tersebut adalah karena terbukanya peluang kerja di luar sektor pertanian yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Menurut keterangan dari ketua desa wisata, cukup banyak juga warga sekitar yang masih mempertahankan profesi sebagai petani, pekebun dan juga penderes kelapa dan bekerja di jasa wisata atau perdagangan di sekitar destinasi wisata saat akhir pekan atau *peak season*.

Temuan ini senada dengan argumen Hamzah, Hermawan, dan Wigati (2018) bahwa *community based tourism* merupakan sektor usaha non pertanian yang "ramah" terhadap wilayah perdesaan. Diversifikasi penghasilan masyarakat Nglinggo Tritis hanya menurunkan sedikit persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sedangkan luas lahan pertanian tidak mengalami penurunan karena kebun teh dan hamparan sawah juga merupakan daya tarik wisata di Nglinggo Tritis. Pendapat Lickorish dalam Mason (2003) juga terbukti bahwa lapangan pekerjaan akan bertambah, pendapatan pelaku usaha pariwisata dan pemerintah akan meningkat dan memberikan kontribusi pada pengembangan wilayah.

Peluang Pekerjaan dari Penyediaan Fasilitas Wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua desa wisata Nglinggo, Anton Nugroho, aktivitas perkebunan teh di Nglinggo sudah mulai berlangsung sejak tahun 1996. Warga Dusun Nglinggo yang kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai petani, pekebun dan penderes kelapa

mulai melakukan aktivitas pariwisata bahkan sebelum adanya destinasi wisata kebun teh Nglinggo. Aktivitas pariwisata di Dusun Nglinggo mulai terbentuk dan terorganisir dengan baik sejak tahun 2004 dimana mulai ada beberapa wisatawan mancanegara yang *live in* di rumah warga. Wisatawan yang datang pada tahap ini masih sebatas pada *allocentric tourist* yang lebih suka bereksplorasi dan tidak mengharapkan *amenity* yang terlalu lengkap dari sebuah destinasi.

Pada masa ini, sebagian warga pedukuhan Nglinggo dan Tritis belum melihat aktivitas pariwisata ini sebagai sebuah aktivitas yang dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Mereka melihat aktivitas ini merupakan aktivitas memperkenalkan budaya asli Kulon Progo kepada orang luar. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sidoluhur, Godean, Kabupaten Sleman (Sanjaya dan Prasetyo, 2019) dan di Desa Wisata Bergas Kidul, Kabupaten Semarang (Yuwono *dkk*, 2021) di mana masyarakat belum memahami bahwa aktivitas desa wisata dapat menjadi hal yang menguntungkan bagi pendapatan masyarakat dan pembangunan di desanya sebelum ada *agent of change* dan pihak luar yang berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Di lain pihak, mengkomersilkan budaya di wilayah desa wisata juga dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Komersialisasi budaya yang berlebihan dapat menimbulkan konflik akibat banyaknya wisatawan *psychocentric* yang hanya ingin menyaksikan budaya sebagai hiburan dan kurang menghargainya sebagai kebudayaan. Jika budaya ini hanya dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan saja, yang terjadi adalah penguasaan kelompok elit terhadap pengelolaan di lokasi tersebut. Pada tahap yang lebih lanjut, bisa pula terjadi gentrifikasi pada lokasi tersebut (Balfour, Fortunato dan Alter, 2016).

Di desa wisata Nglinggo Tritis, Pendampingan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo mulai dilakukan sejak 2007 dengan melakukan pelatihan untuk penyedia jasa *homestay*. Pada tahun ini, pengelolaan *homestay* masih bersifat kekeluargaan dengan biaya hanya Rp50.000,00 per malam sudah termasuk makan malam dan makan pagi. Pengunjung *homestay* pada waktu tersebut mulai bertambah dengan adanya program kerjasama dengan beberapa SMP dan SMA untuk memberikan pengalaman *live in* di pedesaan kepada siswanya. Di samping destinasi wisata, pengelola juga memberikan pengalaman belajar tarian Lengger Tapen dan pada malam terakhir *live in*, wisatawan bersama-sama dengan warga desa lain melakukan tarian Lengger Tapen.

Pada tahun 2004 destinasi ini baru menawarkan wisata alam dengan fasilitas yang sangat terbatas dan baru ada 1 warung yang berdiri. Hingga akhir 2021, jumlah *homestay* sudah mencapai 22 *homestay*, warung sejumlah 20, pengelola kendaraan jeep wisata sebanyak 10 unit, dan pengelola *shuttle* wisata sebanyak 8 unit. Hampir semua pengelola dan pengusaha adalah warga Dusun Nglinggo, bahkan pada saat puncak kunjungan wisatawan misalnya pada libur hari raya dan libur sekolah, pengelola mencari tenaga kerja sementara dari pedukuhan Tritis dan Pedukuhan Nglinggo Timur.

Dusun Tritis berbatasan langsung dengan Dusun Nglinggo. Tidak seperti desa wisata Nglinggo yang sudah mengalami kemajuan cukup baik, Dusun Tritis baru mulai mengembangkan desa wisata sejak tahun 2019 dengan hanya 1 buah *homestay* yang beroperasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua desa Wisata Tritis, Heri Susanto, hingga akhir 2021, ada tambahan 3 *homestay* baru sehingga menjadi 4 *homestay*. Jumlah

pengurus yang terlibat dalam desa wisata Tritis sebanyak 21 orang. Pada saat dilaksanakan wawancara, desa wisata Tritis sedang mengikuti perlombaan desa wisata di tingkat kabupaten, lalu berdasarkan hasil penilaian, pada tanggal 28 Maret 2022, desa wisata Tritis ditetapkan sebagai juara I di tingkat Kabupaten Kulon Progo. Walaupun jumlah kunjungan wisatawan dan fasilitas di desa wisata Tritis belum sebanyak di desa wisata Nglingsgo, Heri menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas di desa Wisata Tritis terus dilakukan baik dari iuran anggota maupun dari biaya pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Fisik Pariwisata.

Temuan ini memperkuat pendapat dari Ryan (2003) bahwa aset pariwisata seperti pemandangan alam dan warisan budaya yang banyak berada di wilayah jauh dari pusat pertumbuhan mampu menarik wisatawan dan berdampak pada redistribusi pendapatan dan pekerjaan ke wilayah pinggiran yang bukan merupakan subjek arus utama ekonomi.

Agen perubahan yaitu ketua Desa Wisata Nglingsgo dan ketua Desa Wisata Tritis mampu mengembangkan potensi desa wisata tanpa mengkomersialisasikan secara berlebihan. Kedua orang elit pariwisata di desa tersebut tidak menguasai aset pariwisata secara sepihak dan justru mampu memberdayakan masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga di pedukuhan Nglingsgo Barat hingga pedukuhan di sekitarnya.

Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan data semester II tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, jumlah penduduk di Dusun Nglingsgo Barat adalah 375 jiwa dengan 168 jiwa (44,8%) memiliki pekerjaan di sektor pertanian sedangkan jumlah penduduk di Dusun Tritis adalah 353 jiwa dengan 189 jiwa (53,53%) bekerja pada sektor pertanian. Persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 187 dari 373 jiwa (50,1%) di Nglingsgo Barat dan 200 dari 368 jiwa (54,3%) di Tritis.

Penelitian Shiddieqy (2016) menunjukkan bahwa petani penderes di Kalurahan Pagerharjo sebagian besar (87,09%) masih berada pada usia produktif dengan pendidikan rata-rata tamat sekolah dasar (61,29%). Kondisi sosial warga desa Pagerharjo cukup baik dan tidak pernah terjadi konflik. Kondisi tempat tinggal seluruh petani penderes tersebut sudah masuk kategori layak huni dan kontribusi pendapatan petani penderes gula aren terhadap total pendapatan rumah tangga rata-rata berada di kisaran 51%-75% (Shiddieqy, 2016). Dari data di atas, Kalurahan Pagerharjo masih bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada tahun 2014, berdasarkan data Album Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, persentase penduduk miskin di Kalurahan Ngargosari adalah 21,09% dan Pagerharjo adalah 18,66% dan menurun menjadi 16,19% untuk Ngargosari dan 13,12% untuk Pagerharjo di tahun 2016 (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2017). Dengan menggunakan basis data yang berbeda yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tahun 2018 kemiskinan di Ngargosari adalah 22,93% dan Pagerharjo adalah 22,08% dan menurun menjadi 9,58% untuk Ngargosari dan 14,53% untuk Pagerharjo di tahun 2020 (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2020). Walaupun menggunakan indikator

penilaian yang berbeda, akan tetapi kedua data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di 2 kalurahan menurun dengan stabil.

Pendapat dari Ryan (2003) juga terbukti di sini bahwa pada ekonomi skala kecil seperti di negara kecil atau wilayah kecil, dampak ekonomi akan terasa lebih besar. Di wilayah Nglingsgo Tritis yang berada pada 2 pedukuhan, dampak ekonomi dari *community-based tourism* lebih terasa dengan penurunan kemiskinan yang relatif stabil. Hal ini juga terjadi akibat tingginya partisipasi masyarakat dalam *community-based tourism* sehingga mampu berjalan secara konsisten jika dilihat dari jumlah masyarakat yang terlibat dan jumlah kunjungan. Terutama pada ekonomi skala kecil (misalnya di negara kecil atau wilayah kecil), dampak ekonomi akan terasa lebih besar.

Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Indikator

Indikator	Kondisi
Pendapatan Daerah	Meningkat
Luas Lahan Pertanian	Tetap
Peluang Kerja	Meningkat; tambahan lapangan pekerjaan di non pertanian
Kemiskinan	Menurun

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pendapatan daerah di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dari pendapatan retribusi yang didapatkan dari kunjungan destinasi wisata Nglingsgo Tritis. Jumlah kunjungan yang mencapai total 228.437 kunjungan pada tahun 2017-2020 memberikan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan sebesar Rp571.759.000,00 untuk Kabupaten Kulon Progo. Industri pariwisata di Nglingsgo Tritis juga termasuk “ramah” terhadap desa karena tidak berdampak pada alih fungsi lahan. Selain lahan, penurunan petani di sekitar destinasi juga tidak signifikan, justru sektor pariwisata mampu memberikan alternatif pekerjaan untuk mengisi masa kosong pekerjaan pertanian yang umumnya bersifat musiman. Aktivitas destinasi wisata juga menurunkan kemiskinan di 2 kalurahan di wilayah destinasi.

Dapat disimpulkan bahwa pada kasus lokasi wisata yang diteliti bahwa kegiatan wisata yang dikelola tidak mengganggu luasan pertanian, namun dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dilihat dari peluang kerja yang disediakan dari kegiatan wisata dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2022). *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2022*. Pengasih: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo.
- Balfour, B., Fortunato, M., Alter, T. (2016). The Creative Fire: An Interaction Framework for Rural Arts-Based Development. *Journal of Rural Studies*. 1-11.
- Berdegúe, Julio A., Rosada, Tomas., dan Bebbington, Anthony J. (2014). *The Rural Transformation*.

- Diwangkari, Andyan.(2014). *Metropolitan Transport Planning Collaboration in Decentralized Indonesia*. Tesis. Radboud University Nijmegen.
- Fahmi, F., dan Sari, I. (2021). Rural Transformation, Digitalisation, and Subjective Wellbeing: a Case Study from Indonesia. *Habitat International*.
- Hamzah, F., Hermawan, H., Wigati. (2018). Evaluasi Dampak Pariwisata terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata 5 (3)*. P 195-202.
- Mason, P. (2003). *Tourism Impacts: Planning and Management*. Oxford: ButterworthHeinemann
- McCulloch, N., Weisbrod, J., dan Timmer, P. (2007). Pathways out of Poverty during an Economic Crisis: An Empirical Assessment of Rural Indonesia. *World Bank Research Working Paper 4173*.
- Nugroho, D. (2018). Community Based Tourism Tantangan Dusun Nglepen dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Pariwisata 5 (1)*. Pp 42-55.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2021). *Database Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2021*. Wates: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2021). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2022*. Wates: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2016) *Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 66/A tahun 2016 tentang Album Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2016*. Wates: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- Pujiriyani, D., dkk. (2018). Deagrarianisasi dan Dislokasi Nafkah Komunitas Petani di Pedesaan Jawa. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 6 (2)*. 137-145.
- Rohani, E., dan Purwoko, Y. (2020). Dampak Sosial Pariwisata terhadap Masyarakat Desa Ekowisata Pampang Gunungkidul menuju Desa Ekowisata Berkelanjutan. *Jurnal Sosiologi Reflektif 14 (2)*. Pp 237-254.
- Rigg, J. (2019). *More than Rural: Textures of Thailand's Agrarian Transformation*. Hawai'i: University of Hawai'i Press.
- Ryan, C. (2003). *Recreational Tourism: Demand and Impacts*. Clevedon: Channel View Publications.
- Sanjaya, R., Prasetyo, I. (2019). Partisipasi Pemuda dalam Pengembangan Rintisan Destinasi Wisata di Desa Sidoluhur, Godean, Sleman. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 1 (3)*.
- Shieddieqy, A. (2019). *Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Petani (Penderes) Gula Aren di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Woods, M. (2005). *Rural Geography: Prodesesses, Responses, and Experiences in Rural Restructuring*. London: Sage Publications, ltd.
- Yoeti, O. (1986). *Penuntun Praktis Pramuwisata Profesional*. Bandung: Angkasa.
- Yuwono, dkk. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Bergas Kidul melalui Rintisan Desa Wisata Edukatif*. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.